

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abidin, Said Zainal, 2004. *Kebijakan Publik*. Jakarta: Penerbit Pancur Siwah Amal Ichlasul.
- Achmad Nurmadi, 1999, *Manajemen Perkotaan*, Yogyakarta, Lingkaran Bangsa.
- Agustino, Leo. 2006. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, Bandung : Alfabeta.
- Andi Pangerang Moenanta, 2018. Syafaat Anugrah Pradana, *Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan Daerah, cetakan 1*, Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- B.N Marbun, 2007. *Kamus Politik*, Edisi Baru, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Dadang Juliantara, 2000, *Arus Bawah Demokrasi*, Yogyakarta, Lapera Pustaka Utama.
- Hanif Nurcholis, 2011. *Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Jakarta: Erlangga.
- HAW, Widjaja. 2003. *Otonomi Desa Merupakan Otonom yang Asli, Bulat dan Utuh*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- HAW, Widjaja. 2013. *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Hadi Koesoemo, Soetardjo Karto. 2000. *Desa*, Bandung: Sumur Bandung.
- Kansil and Chirstine S.T Kansil, 2004. *Ilmu Negara; Umum dan Indonesia, Cet-II*, Jakarta: PT Pradnya Paramita.
- Lukman Santos, 2015. *Hukum Pemerintahan Daerah (Menguarai Problemaika Pemekaran Daerah Pasca Reformasi di Indonesia)*, Cetakan 1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mukti, Yulianto, 2015. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Moh. Fadli, Jazim, Mustafa, 2013. *Pembentukan Peraturan Desa Partisipatif*, Malang: Universitas Brawijaya Press.

- Moh, Hatta, 1953. *Kumpulan Karangan*, Jakarta: Bulan Bintang.
- Nugroho, Riant. 2004. *Public Policy*, Jakarta: PT. Gramedia.
- Ndaraha, Taliziduhu, 2003. *Kybernologi (Ilmu pemerintahan Baru)*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Pasalong, Harbani. 2007. *Teori Administrasi Publik*, Bandung: Alfabeta.
- R Bintarto, 1983. *Interaksi Desa-Kota dan Permasalahannya*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Syaukani. 2002. *Otonomi Daerah Dalam Negeri Kesatuan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sarman, Mohammad, 2011. *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Setiwan, Guntur, 2004. *Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sutoro Eko, 2005. *Masa Lalu, Masa Kini dan Masa Depan Otonomi Daerah, Sketsa Perjalanan 100 Tahun*. Jakarta : Instut For Local Devolepment dan Yayasan Tifa.
- Sri Sudaryatmi, 2000. Sukirno dan TH Sri Kartini, *Beberapa Aspek Hukum Adat*, , Semarang: Badan Penerbit Undip.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar 1945.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No 6 Tahun 2016 tentang Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2017 tentang Badan Pemusyawaratan Desa.

Peraturan Bupati Bantul Nomor 104 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Di Desa.

## **Jurnal**

Andi Pitono dan Kartiwi, "Penguatan Pemerintahan Desa dan Kelurahan Menuju Pembangunan Berkelanjutan dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat", *Jurnal Politikologi Volume 3, No. 1, Oktober 2016, 27-37.*

Antono Herry P.A., "Kesiapan Desa Menghadapi Implementasi Undang-Undang Desa" *Jurnal Ilmiah CIVIS, Volume 5, No 1, Januari 2015, 738*

Clement Belly Heden Higau, "Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Desa Dalam Meningkatkan Pelayanan Masyarakat Di Desa Matalibaq Kecamatan Long Hubung Kabupaten Mahakam Ulu" *eJournal Ilmu Pemerintahan, Volume 3, Nomor 3, 2015, 1448-1459.*

Emi Heriyati "Peran Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Batu Balai Kecamatan Muara Bengkal Kabupaten Kutai Timur" *eJournal Ilmu Pemerintahan. Volume 3, Nomor 4, 2015, 1914-1927*

Daian Kus Pratiwi, Dessy Ariani, Despan Heryansyah, "Implementasi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terhadap Kesiapan Aparatur dan Pengaruhnya terhadap Tata Kelola Pemerintahan yang baik dalam Pemerintahan Desa di Kabupaten Bantul" *Jurnal Riset Daerah. Volume 16. Nomor 2, Agustus 2017, 2707*

Didik G. Suharto, "Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam Perspektif Desentralisasi Administratif Dan Desentralisasi Politik" *Jurnal Bina Praja, Volume 4 No. 3 September 2012, 153-156.*

Ferry Irawan Febriansyah, "Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia." *STAI Muhammadiyah Tulungagung. Volume 21 Nomor 3, September 2016, 221*

Hengki Andora, "Desa Sebagai Unit Pemerintahan Terendah Di Kota Pariaman" *Jurnal Ilmu Hukum Volume 2 Nomor 2, Februari 2005, 14*

Linda Muchacha Paramitha, Tjahjanulin Domai, Suwondo. "Kinerja Aparat Pemerintah Desa Dalam Rangka Otonomi Desa". *Jurnal Administrasi Publik (JAP), Volume 1, Nomor. 4, 91-100*

Nur'aini Muslim dan Irwan Nasution 2014. "Kinerja Aparat Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa Pantai Labu Pekan" *Jurnal Ilmu*

*Pemerintahan dan Sosial Politik Universitas Medan Area. Volume 2  
Nomor 2, 2014, 99-110*

**Website**

Rooyalamony, Otonomi Desa , 01 Oktober 2012, [m.kompasiana.com](http://m.kompasiana.com), di akses  
pada 11November 2018 jam 20:55 WIB.

Novri Hp, Zoon Politicon dari Internet,  
<https://artiini.com.org/201602/pengertian-soon-politicon/html> diakses  
pada 07 November 2018, 23:40.